

=====

EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA TERPADU MANDIRI TELANG KABUPATEN BANYUASIN

A. Ridhuan Habena, S. I.Kom., M. Si.

Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang

achmadridhuanhabena@gmail.com

ABSTRACT

This study examines how the Evaluation of Integrated Urban Development Programme in Independent Telang Banyuasin. The research variables consisted of context, input, process and product. Design analysis using descriptive analysis method which is carried out through several stages: data reduction, conclusion and verification. With the unit of analysis of Manpower and Transmigration Banyuasin. Data were collected through library research, observation and interviews. Results of the study revealed that with the support of government Banyuasin for basic infrastructure development with empowerment of communities the KTM Telang is able to carry its potency that district make it to be the new center of economy, the center of government administration, and speed the overall regional development. Disnakertrans Banyuasin is supported by 83 employees who are dominated by groups of the structural power. The composition of employees in terms of level of education, can be quite adequate, since most is a degree with strata 1 to strata 2. Sources of state budget funds amounting to Rp. 3.3 billion, -. In transport infrastructure since the year 2008 up to now has been absorbing the budget either through APBN and APBD Banyuasin outside the Central Budget and province are as follows covering Management Office, Building Business, Markets, Smart Houses, mosques and house Jaga, Islamic Center, Parks cities and Tugu KTM, Roads and Bridges concrete Pier concrete and office space, the Network for Clean Water, Electricity Network and Street Lights, Buildings Rice Milling Plane (RPM), House Wira Business, Building RO system, Gate KTM and Regions Seed Center. Telang KTM development program which is managed by Disnakertrans Banyuasin has not been maximized to various constraints faced such as lack of quality human resources and inadequate budget. In the future, the work program Disnakertrans still need to be organized better. Some things need attention to be followed all the parties in the development of KTM Telang: Need Improvement, Development Implementation Coordination and synchronization of all stakeholders related sectors location with Village Center Zone KTM KTM. Programs and Activities Implementation of Physical Development of 2020 has been implemented in accordance with the target. Regional Development Action Plan 2021 KTM Telang directed, among others, for the construction of roads, improvement of roads, construction of buildings, renovation of buildings, the installation of water pipes clean.

Keywords: Evaluation, Development Program, KTM

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana Evaluasi Program Pembangunan di Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin. Variabel penelitian terdiri dari context, input, proses dan produk. Desain analisis menggunakan metode deskriptif analisis yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan unit analisis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adanya dukungan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi KTM Telang diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan. Disnakertrans Kabupaten Banyuasin didukung oleh 83 pegawai yang didominasi oleh kelompok tenaga struktural. Komposisi pegawai ditinjau dari tingkat pendidikan, dapat dikatakan cukup memadai, karena sebagian besar adalah sarjana dengan tingkat strata 1 sampai strata 2. Sumber dana APBN sebesar Rp. 3.300.000.000,-. Pembangunan Sarana dan Prasarana sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang telah

menyerap anggaran baik melalui APBN maupun APBD Kabupaten Banyuasin diluar Anggaran Pusat dan Provinsi adalah sebagai berikut meliputi Kantor Pengelolaan, Gedung Pusat Bisnis, Pasar, Rumah Pintar, Masjid dan Rumah Jaga, Islamic Center, Taman Kota dan Tugu KTM, Jalan dan Jembatan Beton, Dermaga beton dan ruang kantor, Jaringan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik dan Lampu Jalan, Bangunan Rice Milling Plane (RPM), Rumah Wira Usaha, Bangunan RO system, Gerbang KTM dan Kawasan Seed Center. Program pembangunan KTM Telang yang diprogramkan oleh Disnakertrans Banyuasin selama ini belum maksimal, disebabkan dari berbagai kendala yang dihadapi seperti aspek sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai. Pada masa yang akan datang, program kerja Disnakertrans masih perlu ditata secara lebih baik. Beberapa hal perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti semua pihak dalam pembangunan KTM Telang: Perlu Peningkatan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dari semua pihak baik sektor terkait dilokasi Pusat KTM dengan Desa Kawasan KTM. Program dan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target. Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan KTM Telang Tahun 2021 diarahkan antara lain untuk pembuatan jalan, peningkatan jalan, pembangunan gedung, rehab gedung, pemasangan pipa air bersih.

Kata kunci : Evaluasi, Program Pembangunan, KTM

PENDAHULUAN

Pembangunan Transmigrasi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal. Program ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan transmigrasi adalah (a) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, (b) peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, dan (c) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integritas dipemukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan terutama diarahkan kepada pembangunan pertanian, yaitu peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian diharapkan akan dapat mendukung peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan. Menurut (Utomo, 2005), untuk mewujudkan hal tersebut maka diwilayah-wilayah transmigrasi perlu dikembangkan pusat-pusat agroindustri pedesaan yang dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan dan akan memacu pertumbuhan wilayah. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur dan akses pasar, sehingga akan terjadi harmonisasi pembangunan wilayah. Kota Terpadu Mandiri Telang mulai dicanangkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2007 atau termasuk KTM Generasi Pertama dengan luas kawasan KTM Telang sesuai Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan dan Masterplan KTM Telang seluas 95.542,093 Ha yang mencakup desa-desa, baik eks transmigrasi maupun desa eks marga yang berada dalam Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Muara Telang dan Kecamatan Sumber Marga Telang (35 Desa). Komoditas unggulan dari KTM Telang adalah Beras, Jagung dan Kelapa dengan luas lahan sawah sekitar 50.000 Ha yang meliputi sawah transmigrasi dan sawah eks marga. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah membentuk Tim Kelompok Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin sebagai Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 227 Tahun 2007 Tanggal 16 Maret 2007. Pembangunan Sarana dan Prasarana sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang telah menyerap anggaran baik melalui APBN maupun APBD Kabupaten Banyuasin diluar Anggaran Pusat dan Provinsi adalah sebagai berikut meliputi kantor pengelolaan, gedung pusat bisnis, pasar, rumah pintar, masjid dan rumah jaga, *islamic center*, taman kota dan tugu ktm, jalan dan jembatan beton, dermaga beton dan ruang kantor, jaringan sarana air bersih, jaringan listrik dan lampu jalan, bangunan *rice milling plane* (RPM), rumah wira usaha, bangunan *ro system*, gerbang KTM dan kawasan *seed center*. Bangunan kantor penunjang KTM yang telah ada seperti : rumah pintar, kantor pusat bisnis, bangunan pasar KTM, pabrik pupuk granular, RO System, bangunan RMP dan pasar belum dimanfaatkan oleh SKPD secara maksimal. Pada saat ini KTM Telang masih dikelola oleh UPTD KTM dengan Eselon IV/a dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin. Masih adawarga yang telah mendirikan bangunan diatas tanah yang

===== sudah dilaksanakan ganti rugi karena sesuai *Site Plane* akan dibangun Pos Polisi dan Terminal disamping bangunan pasar KTM.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pembangunan di Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin”.

Identifikasi Masalah

1. Pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana yang dibutuhkan KTM telah dilaksanakan namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD terkait.
2. Telah berdiri bangunan masyarakat semi permanen dan permanendi Lahan Pusat lokasi KTM Telang yang telah dilaksanakan ganti rugi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Evaluasi Program Pembangunan di Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin.

Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan atau input, alternatif solusi dalam menghadapi kendala mengenai Evaluasi Program Pembangunan di Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam (Aprilia, 2009) adalah “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

2. Model-Model Evaluasi

Kaufman dan Thomas dalam (Arikunto: 2007) membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a. *Goal Oriented Evaluation Model*(Tyler, 1949)
- b. *Goal Free Evaluation Model*(Scriven, 1991)
- c. *Formatif-Sumatif Evaluation Model*(Scriven, 1991)
- d. *Countenance Evaluation Model*(Stake, 1994).
- e. *Model Responsive Evaluation Model*(Stake, 1994)
- f. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan (Fernandes, 1984)
- g. *CIPP Evaluation Model*(Stufflebeam, 1986)
- h. *Discrepancy Model* (Provus, 1971)

3. Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program

Menurut PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*EX-ANTE*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

=====

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*EX-POST*) pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

4. Tujuan Evaluasi Program

Seperti disebutkan oleh (Sudjana, 2006:48), tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :

- a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
- c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
- d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program;
- f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

5. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan.

(Sadono Sukirno: 2006; 53).

Menurut (Sondang. P, 2008) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa.

Pengertian pembangunan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang berencana yang tanpa akhir dengan melalui tahapan-tahapan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan juga dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam suatu negara.

6. Kota Terpadu Mandiri

Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Fungsi perkotaan dimaksud antara lain meliputi :

- 1) Pusat kegiatan agribisnis mencakup :
 - Pengolahan hasil pertanian menjadi barang produksi dan atau barang konsumsi
 - Pusat pelayanan agroindustri khusus (*special agroindustry services*), dan pemuliaan tanaman unggul;
 - Pusat pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri dan jasa;
- 2) Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya lembaga keuangan pasar- pasar grosir dan pergudangan.
 - a. Tujuan Pembangunan KTM
 - Menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar, seta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja.
 - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar.
 - Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.
 - b. Sasaran
 - Peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan,
 - Peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk sekitar,
 - Pendapatan asli daerah,
 - Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan,
 - Perluasan kesempatan kerja.

=====

- Peningkatan jaringan infrastruktur.

c. Landasan Hukum

- Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang R.I. No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
- Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang R.I. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah R.I, Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

d. Kriteria

- Masuk dalam kawasan budidaya non kehutanan (APL dan HPK) dan tidak bertentangan dengan RTRWP/RTRWK.
- Luas seluruh wilayah KTM minimal 18.000 Ha, yang diprediksikan berdaya tampung + 9.000 KK terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar.
- Memiliki potensial untuk mengembangkan komoditi unggulan yang memnuhi skala ekonomis.
- Mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat pertumbuhan yang sudah ada.
- Kawasan yang diusulkan bebas dari peruntukan pihak lain, tidak mengandung masalah sosial, merupakan aspirasi masyarakat setempat dan atau badan usaha.
- Usulan pembangunan KTM merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dan DPRD.

e. Perolehan Tanah

Areal KTM dapat berasal dari HPL dan atau HGU dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila tanah HPL Depnakertrans, maka sebagian HPL dapat dilepaskan untuk diproses menjadi tanah HGU Badan Usaha.
- Apabila tanah HGU Badan Usaha, maka sebagian HGU dapat dilepaskan menjadi HPL Depnakertrans.

7. Konsep Kota Terpadu Mandiri

a. Konsep Struktur Ruang KTM

- Dalam setiap KTM terdapat beberapa satuan kawasan pengembangan, sedangkan setiap satuan kawasan pengembangan terdiri atas beberapa satuan pemukiman. Setiap satuan pemukiman berfungsi sebagai daerah budidaya pertanian.
- Satuan Kawasan pengembangan merupakan kumpulan lokasi permukiman transmigrasi dan desa sekitar yang terhubung oleh jaringan transportasi dan memiliki desa utama yang berfungsi sebagai tempat pengumpul pengolah hasil.
- Dari beberapa satuan kawasan pengembangan ditentukan satu pusat pengembangan utama yang diarahkan untuk menjadi embrio pusat KTM yang berfungsi sebagai pusat agroindustri, pusat pelayanan industri, pusat perdagangan dan pusat pendidikan dan pelatihan.
- Pusat KTM mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan desa utama dan desa sebagai wilayah belakang (*rural urban linkage*)

b. Konsep Pembangunan Usaha

- Konsep Pengembangan Usaha pada Kota Terpadu Mandiri, diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan melalui sistem agribisnis dan agro industri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan investor
- Bidang usaha pertanian dan non pertanian merupakan kegiatan yang saling terkait yang meliputi usaha budidaya pertanian dalam arti luas dan usaha pendukung pertanian dan non pertanian

c. Konsep Pengembangan Masyarakat (Transmigran dan Penduduk Sekitar)

- Bidang pengembangan masyarakat terdiri dari bidang ekonomi; bidang sosial budaya; bidang mental spiritual; bidang kelembagaan dan bidang keamanan.
- Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk masyarakat pertanian moderen yang rencananya disusun dengan pendekatan partisipatif , berbasis kebutuhan serta melibatkan pelaku usaha dan pemerintah daerah
- Pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, pengembangan kemitraan, dan pelayanan jasa pemerintahan
- Pengembangan masyarakat diarahkan untuk mencapai perilaku masyarakat yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan, berfikiran moderen dan mandiri menuju masyarakat madani.

-

=====

8. Mekanisme Pembangunan KTM

Pengusulan

Pemerintah kabupaten mengusulkan calon lokasi KTM dilengkapi dengan peta kawasan skala 1 : 50.000 kepada Menteri melalui gubernur

Pemerintah provinsi melakukan pengkajian (ekspose, kaji lapang, penelitian administrasi) dan menkoordinasikan antar dinas

Apabila usulan memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka gubernur menerbitkan rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri.

Menteri melakukan pengkajian dan koordinasi antar departemen

Apabila usulan memnuhi kriteria yang ditetapkan, maka Menteri menerbitkan Surat Persetujuan calon lokasi KTM

Perencanaan

Masterplan merupakan rencana pembangunan yang bersifat komprehensif

Pemerintah kabupaten / kota menyusun masterplan KTM yang memuat rencana pengembangan ruang, usaha ekonomi, pengembangan masyarakat yang dijabarkan didalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Pemerintah provinsi menyusun masterplan KTM yang meliputi dua kabupaten / kota atau lebih.

Pemerintah berdasarkan usulan pemerintah daerah dapat menyusun masterplan KTM bersama-sama pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

Penetapan

Masterplan KTM ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten / Kota .

Masterplan KTM yang meliputi lebih dari satu kabupaten / kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Program dan Anggaran

- Rencana pembangunan jangka dan tahunan yang terdapat dalam masterplan dijabarkan dalam program pembangunan untuk dilaksanakan insstansi lintas sektor, badan usaha / swasta dan masyarakat
- Program pembangunan diatas meliputi program pengembangan sarana dan prasarana, program penguatan sumber daya manusia dan pengembangan masyarakat dan program peningkatan inventasi dan penguatan ekonomi rakyat
- Sumber pembiayaan berasal dari APBN, anggaran pendapatan belanja desa, swasta / lembaga keuangan / perbankan, masyarakat, sumber dana lainnya yang sah.

Pelaksanaan

- Program yang telah disepakati disosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pembangunan dan pengembangan KTM;
- Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan secara bersama danterpadu oleh pemerintah, badan usaha / swasta dan masyarakat.
- Untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dibentuk kelompok kerja di tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kota

Monitoring dan Evaluasi

Untuk mendapatkan gambaran kemajuan disetiap tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan monitoring secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat lokasi KTM sampai dengan tingkat pusat.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran disetiap tahapan pembangunan dan pengembangan KTM, secara berkala dilakukan evaluasi meliputi sasaran kinerja masukan.Proses, keluaran dan manfaat langsung.

9. Cara Pembangunan KTM

Pembangunan KTM dimulai dengan penyusunan Master Plan KTM oleh pemerintah daerah.Pemerintah pusat memfasilitasi dalam bentuk bimbingan teknis dan mediasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.Bila diperlukan, fasilitasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan teknis dan pendanaan.

a. Substansi Master Plan KTM

Kebutuhan sarana-prasarana (infrastruktur)

Kebutuhan Detail Design setiap aspek teknis

-
- Kebutuhan fasilitas permukiman dan pelayanan
 - Alternatif pengembangan usaha dan Investasi
 - Kebutuhan dana dan SDM
 - Peran serta setiap tingkat pemerintahan dan sektor
 - Peran Pemerintah, masyarakat, dan investor
 - Pengorganisasian dan pelaksanaan.

b. Manfaat Master Plan KTM

- Arahan kebijakan, program, dan mekanisme (pola) pembangunan SDA, SDM, dan SDB (sumber daya buatan yang meliputi prasarana dan sarana pembangunan) sehingga pembangunan mampu menghadirkan kemajuan, kemakmuran dan kemandirian secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- Arahan alokasi pemanfaatan pengendalian ruang (tata ruang) untuk kawasan lindung (preservasi dan konservasi) dan kawasan budidaya (pembangunan).
- Arahan komposisi dan tingkat (rate) berbagai kegiatan pembangunan yang efisien, adil, dan ramah lingkungan.

Penelitian Yang Relevan

Budi Sutomo (2008), meneliti mengenai Studi Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Berbasis Potensi Agribisnis Masyarakat dan Kawasan Di Kawasan Transmigrasi Mesuji Kabupaten Tulang Bawang. Dengan penelitian menunjukkan Berdasarkan identifikasi potensi pengembangan komoditas unggulan menggunakan hasil analisis dan dibandingkan dengan kondisi eksisting penggunaan lahan diperoleh perwilayahan pengembangan komoditas unggulan pada lokasi KTM Mesuji yaitu komoditi padi sawah dapat dikembangkan pada lahan seluas 19.295,06 Ha (32,35%), jagung seluas 7.600,264 Ha (12,74%), karet seluas 9.541,308 (16%), kelapa sawit seluas 23.208,651 Ha (38,91%). Berdasarkan hasil LQ, analisis finansial dan margin pasar, komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mesuji adalah padi, jagung, kelapa sawit dan karet. Arahan pengembangan KTM Mesuji dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Desa dengan hierarki I yang didukung aspirasi masyarakat dan memiliki potensi wilayah yang sesuai serta kelembagaan yang substain dapat difungsikan sebagai pusat aktivitas pelayanan; (2) Desa hierarki II yang memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet dapat difungsikan sebagai pusat agribisnis dan agroindustri perkebunan kelapa sawit dan karet; (3) Desa hierarki II yang memiliki potensi untuk pengembangan padi dan jagung dapat difungsikan sebagai pusat agribisnis dan agroindustri pertanian pangan; (4) Desa hierarki III dengan potensi kesesuaian lahan sesuai dan basis pengusahaan untuk tanaman padi dan jagung dapat difungsikan sebagai pusat produksi pangan wilayah

Herning Ratna Kusumawati (2011), meneliti mengenai Evaluasi Penetapan Kota Terpadu mandiri di Sarolangun. Dengan Penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis tipologi daerah diketahui bahwa di Propinsi Jambi banyak daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Kabupaten Sarolangun sendiri merupakan daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Dari sembilan sektor yang terdapat di Kabupaten Sarolangun, yang menjadi sektor unggulan dan masih berpotensi menjadi unggulan adalah sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan serta sektor Konstruksi. Pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor unggulan di daerah tersebut. Aspek penting yang dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk percepatan pembangunan KTM di Kabupaten Sarolangun yaitu sebagai berikut: 1) Komoditas unggulan sebagai basis pengembangan ekonomi KTM adalah komoditas pertanian dan juga komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura; 2) Pembangunan KTM di Kabupaten Sarolangun pada hakekatnya merupakan integrasi program yang mempunyai prinsip-prinsip berbeda sehingga kelembagaan yang dibentuk bersifat terpadu yang dapat mengakomodasi kepentingan pelaku; 3) Melakukan pengembangan kota (network City) khususnya pada pusat KTM di Kabupaten Sarolangun dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah; 4) Program transmigrasi sebagai pendorong masuknya sumber daya manusia atau tenaga kerja di Kabupaten Sarolangun dapat menjadi faktor penting guna meningkatkan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Sarolangun.

Kerangka Pemikiran

Model CIPP berorientasi kepada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator di dalam membuat keputusan. evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Sesuai dengan nama modelnya, model ini membagi empat jenis kegiatan evaluasi, yaitu:

- =====
- 1) *Context evaluation to serve planning decision*, yaitu konteks evaluasi untuk menentukan kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil.
 - 2) *Input evaluation, structuring decision*. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
 - 3) *Process evaluation, to serve implementing decision*. Evaluasi proses (process evaluation) diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik (*feedback*) bagi orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas. Setiap aktivitas dimonitor perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian demikian penting karena berguna bagi pengambil keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan. Disamping itu catatan akan berguna untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau program ketika dikaitkan dengan keluaran yang ditemukan.
 - 4) *Product evaluation, to serve recycling decision*. merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan “*judgement outcomes*” dalam hubungannya dengan konteks, input, dan proses, kemudian diinterpretasikan harga dan jasa yang diberikan. Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan dihentikan. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional. Analisis produk ini diperlukan perbandingan antara tujuan, yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, perentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu.

KESIMPULAN

Bahwa dapat disimpulkan dari uraian perbab sebagai berikut:

1. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi KTM Telang diharapkan mampu mengungkap potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dari evaluasi kegiatan pembangunan KTM Telang Kabupaten Banyuwangi antara lain: a) sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program pembangunan KTM yang akan datang, b) untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen pembangunan KTM saat ini serta dimasa yang akan datang, c) memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan KTM, perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus-menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan.
2. Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi didukung oleh 83 pegawai yang didominasi oleh kelompok tenaga struktural. Komposisi pegawai ditinjau dari tingkat pendidikan, dapat dikatakan cukup memadai, karena sebagian besar adalah sarjana dengan tingkat strata 1 sampai strata 2. Sumber dana APBN sebesar Rp. 3.300.000.000,-. Pembangunan Sarana dan Prasarana sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang telah menyerap anggaran baik melalui APBN maupun APBD Kabupaten Banyuwangi diluar Anggaran Pusat dan Provinsi adalah sebagai berikut meliputi Kantor Pengelolaan, Gedung Pusat Bisnis, Pasar, Rumah Pintar, Masjid dan Rumah Jaga, Islamic Center, Taman Kota dan Tugu KTM, Jalan dan Jembatan Beton, Dermaga beton dan ruang kantor, Jaringan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik dan Lampu Jalan, Bangunan Rice Milling Plane (RPM), Rumah Wira Usaha, Bangunan RO system, Gerbang KTM dan Kawasan Seed Center.
3. Program pembangunan KTM Telang yang diprogramkan oleh Disnakertrans Banyuwangi selama ini belum maksimal diarahkan kedalam program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal

=====

ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi seperti aspek sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai, Lahan Pusat lokasi KTM Telang yang telah dilaksanakan ganti rugi sesuai dengan Site Plan diperuntukkan lahan terminal dan pos polisi telah berdiri bangunan masyarakat semi permanen dan permanen, Bangunan Kantor Penunjang KTM yang telah ada seperti : Rumah Pintar, Kantor Pusat Bisnis, Bangunan Pasar KTM, Pabrik Pupuk Granular, RO System, Bangunan RMP dan Pasar belum dimanfaatkan oleh SKPD secara maksimal. Sehingga dimasa yang akan datang, program kerja Disnakertrans masih perlu ditata secara lebih baik. Beberapa hal perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti semua pihak dalam pembangunan KTM Telang: Perlu Peningkatan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dari semua pihak baik sektor terkait dilokasi Pusat KTM dengan Desa Kawasan KTM.

4. Program dan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target. Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan KTM Telang Tahun 2021 diarahkan antara lain untuk pembuatan jalan, peningkatan jalan, pembangunan gedung, rehab gedung, pemasangan pipa air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, M. (2007). *Evaluasi Rencana Lokasi Pemandahan Terminal Induk KM 6 Banjarmasin*. Yogyakarta: MPKD Universitas Yogyakarta.

Aprilia, H. (2009). *Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul*. Yogyakarta: MPKD Universitas Gajah Mada.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budi Sutomo (2008), *Studi Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Berbasis Potensi Agribisnis Masyarakat dan Kawasan Di Kawasan Transmigrasi Mesuji Kabupaten Tulang Bawang*.

Herning Ratna Kusumawati (2011), *Evaluasi Penetapan Kota Terpadu Mandiri di Sarolangun*.

Lexi, M. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Meleong, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siahaan, E. (2002). *Filosofi Perencanaan Pembangunan Kota Sesuai Paradigma Baru di Indonesia, : Hakikat Ilmu Untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat*.

Singaribun, M., & Effendi. (2006). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Singaribun, M., Effendi, & Sofian. (2001). *Metode Penelitian Survei. Edisi ketiga*. Jakarta: LP3ES.

Sondang, P, S. (2008). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sudjana, N. (2006). *Penilaian Proses Belajar mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sudjana, N., & Ibrahim. (2007). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sumarjo. (2004). *Transmigrasi Menyongsong Era Otonomi Daerah dan Globalisasi Ekonomi*.

Supriatna, T. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

=====

Sutopo, H. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Sutopo, H. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Tjokroamidjojo, B. (2000). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Utomo, M. (2005). Tinjauan Kritis Kebijakan dan Implementasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Sumber Lainnya

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Kepmen Nakertrans No. 214 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan KTM